

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NO. 86 TAHUN 2017 PASAL 12
AYAT (2) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
TAHUN 2005-2025 KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**ANI DACASTA
NIM. 07011182126047**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 86 TAHUN 2017 PASAL 12 AYAT (2) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005-2025 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

USULAN PENELITIAN

Diajukan oleh :

ANI DACASTA
NIM. 07011182126047

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Desember 2024

Pembimbing

Dra. Tuty Khairunnisayah, M.A
NIP. 196201051988032004



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyo, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 86 TAHUN 2017 PASAL 12 AYAT (2) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005-2025 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

SKRIPSI

Diajukan oleh :

ANI DACASTA
NIM. 07011182126047

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Maret 2025

Pembimbing

Dra. Tuty Khairunnisayah, M.A
NIP. 196201051988032004



Mengetahui,

Ketua Jurusan




Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 86 TAHUN 2017 PASAL 12 AYAT (2) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005-2025 KABUPATEN OGANKOMERING ULUSELATAN

SKRIPSI

Diajukan oleh :
ANI DACASTA
NIM. 07011182126047

Telah dipertahankan didepan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 21 Maret 2025

Pembimbing :

Dra. Tutv Khairunniswah, MA
NIP. 196201051988032004


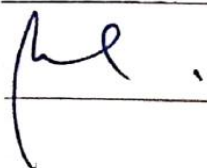
Tanda Tangan



Dosen Penguji :

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001


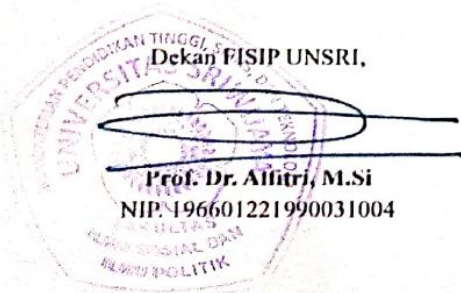
Tanda Tangan

Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008021009

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ani Dacasta
NIM : 07011182126047
Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat (2) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Indralaya, 13 Maret 2025



Ani Dacasta

NIM.07011182126047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Tak semua usaha itu dipermudah, tapi semua
yang berusaha sudah pasti akan berbuah
You live. You learn. You Upgrade”
(Ani Dacasta)*

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

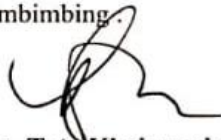
- 1. Diri Sendiri**
- 2. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 3. Keluarga Besar Terkasih**
- 4. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP
UNSRI**
- 5. Teman-Teman Jurusan Administrasi
Publik Angkatan 2021**
- 6. Almamater Kuning Kebanggaan,
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji tingkat kepatuhan implementor, efektivitas koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan keterlibatan aktor dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RPJPD belum optimal ditandai dengan lemahnya koordinasi antar OPD, hierarki pelaksanaan yang belum jelas, serta kesulitan dalam mengaitkan program tahunan dengan target jangka panjang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, sistem pemantauan yang lebih efektif, serta kebijakan berbasis data dalam mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, RPJPD, Perencanaan Pembangunan, Ogan Komering Ulu Selatan, Evaluasi Kebijakan

Pembimbing



Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP. 196201051988032004

Indralaya, 13 Maret 2025
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) of Ogan Komering Ulu Selatan Regency based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 86 of 2017. The main focus of this study is to examine the level of compliance of implementers, the effectiveness of coordination between Regional Government Organizations (OPDs), and the involvement of actors in the implementation of regional development policies. This study uses a qualitative approach using interview, observation, and document analysis techniques. The results of the study indicate that the implementation of the RPJPD has not been optimal, which is characterized by weak coordination between OPDs, an unclear implementation hierarchy, and the difficulty of aligning annual programs with long-term targets. To overcome these problems, it is necessary to increase stakeholder synergy, build a more effective monitoring system, and adopt data-based policies to support sustainable development planning.

Keywords : Policy Implementation, RPJPD, Development Planning, South Ogan Komering Ulu, Policy Evaluation

Advisor,



Dra. Tuty Khairunnisvah, MA
NIP. 196201051988032004

Indralaya, 13 March 2025
Head of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat (2) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan**” tepat pada waktunya. Penelitian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si selaku Sekretaris Jurusan.
4. Ibu Dra. Tuty Khairunnisyah, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Mbak Ita Permatasari, selaku Admin Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang telah membantu dalam proses administrasi selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bantuan, serta bimbingan kepada peneliti selama perkuliahan.
7. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan semangat selama perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua saya dan seluruh keluarga serta orang terkasih saya yang telah memberikan dukungan doa, dukungan moril dan material yang tak terhingga.
9. Kepada sahabat saya Pratista Andanitya sekaligus partner terbaik sepanjang masa yang bersedia menjadi pendengar yang baik, dan senantiasa membantu, memberikan dukungan, serta semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada seseorang dengan NIM 07011182126032 yang selalu penulis kagumi setiap detiknya, terimakasih atas kehadirannya didalam kehidupan penulis yang selalu memberi semangat disetiap perjalanan penyusunan Skripsi ini sampai dengan selesai.
11. Kepada sahabat penulis Ida Nurwalidaini, S.T., Fitroh Khoirum Nisak, S. AP., Afifah Putri Kinanti, S. TP terimakasih atas ketersediaannya untuk selalu membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada seluruh rekan seperjuangan dan teman-teman kelas A Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan banyak dukungan kepada saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian dan pelaksanaan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan, tetapi peneliti sudah berusaha untuk dapat menyajikan yang terbaik, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Indralaya, 20 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Secara Teoritis	9
1.4.2 Secara Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	10
2.2.1 Konsep Implementasi.....	10
2.2.2 Aktor-Aktor Implementasi	10
2.2.3 Penghambat Implementasi Kebijakan.....	13
2.2.4 Definisi Kebijakan Publik	16
2.2.5 Tujuan Kebijakan Publik.....	16
2.2.6 Jenis-Jenis Kebijakan Publik	17
2.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).....	19
2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	19
2.5 Perencanaan Pembangunan	21
2.6 Evaluasi Kebijakan Publik	23

2.6.1 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik	23
2.6.2 Tujuan Evaluasi.....	24
2.7 Penelitian Terdahulu.....	26
2.8 Kerangka Berpikir.....	36
2.8.1 Model Implementasi Kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986)	36
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Variabel Penelitian	44
3.2.1 Definisi Konseptual.....	44
3.2.2 Fokus Penelitian	45
3.3 Unit Analisis Data	47
3.4 Jenis dan Sumber Data	47
3.4.1 Jenis Data	47
3.4.2 Sumber Data.....	47
3.5 Informan Penelitian.....	51
3.6 Teknik Pengumpulan Data	52
3.7 Teknik Analisis Data	54
3.8 Jadwal Penelitian.....	58
3.9 Sistematika Penulisan	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Lokasi Penelitian.....	61
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
4.1.2 Visi dan Misi BAPPERIDA	62
4.1.2.1 Visi	62
4.1.2.2 Misi	63
4.2 Struktur Organisasi BAPPERIDA Ogan Komering Ulu Selatan.....	63
4.3 Deskripsi Informan Penelitian.....	72
4.4 Hasil Penelitian	73
4.4.1 <i>Compliance</i> (Kepatuhan	73
4.4.2 <i>What's Happening and Why?</i> (Apa yang Terjadi dan Mengapa?).....	81
4.5 Pembahasan.....	99
4.5.1 <i>Compliance</i> (Kepatuhan).....	100

4.5.2 <i>What's Happening and Why?</i> (Apa yang Terjadi dan Mengapa?).....	101
BAB V KESIMPULAN.....	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hubungan Keterkaitan RPJPD dengan Pelaksanaan Lainnya	4
Gambar 2 Alur Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah di BAPPERIDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	5
Gambar 3 Empat Model Implementasi Kebijakan	13
Gambar 4 Kerangka Berpikir	40
Gambar 5 Model Teknik Analisis Data	57
Gambar 6 Lokasi BAPPERIDA Ogan Komering Ulu Selatan.....	62
Gambar 7 Struktur Organisasi BAPPERIDA	64
Gambar 8 Rapat Pelaksanaan RPJPD Bersama Implementor	78
Gambar 9 Interview Peneliti Bersama Informan Kepala Bidang PPEPD	80
Gambar 10 Interview Peneliti Bersama Informan Staf Fungsional PPEPD.....	84
Gambar 11 Rapat Para Informan Bersama OPD	87
Gambar 12 Interview Peneliti Bersama Informan Staf Fungsional PPEPD.....	91
Gambar 13 Interview Peneliti Bersama Informan Kepala Bidang PPEPD	92
Gambar 14 Interview Peneliti Bersama Informan Bidang Analisis Data dan Informasi	93
Gambar 15 Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Desa	97
Gambar 16 Interview Peneliti Bersama Informan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2 Fokus Penelitian.....	46
Tabel 3 Sumber Data Pendukung	50
Tabel 4 Informan Penelitian	51
Tabel 5 Jadwal Penelitian	58
Tabel 6 Tugas dan Fungsi Implementor yang Terlibat	84
Tabel 7 Standar Operasional Prosedur (SOP).....	93
Tabel 8 Matriks Temuan Hasil Penelitian.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	117
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	123
Lampiran 3 SK Skripsi.....	125
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi	126
Lampiran 5 Kartu Perbaikan Skripsi.....	127
Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017	128
Lampiran 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	129
Lampiran 8 Capaian Indikator Kinerja RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	131

DAFTAR SINGKATAN

1. RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2. RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
3. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
6. BAPPERIDA : Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
7. Renstra : Rencana Strategis
8. Musrenbang : Musyawarah Rencana Pembangunan
9. Renja : Rencana Kerja
10. Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
11. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
12. RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang baik dan berkelanjutan merupakan landasan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan lingkungan. Dalam konteks global, agenda Sustainable Development Goals (SDGs) telah menetapkan rumusan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mencakup aspek sosial, lingkungan, infrastruktur, dan aspek lainnya. Hal ini penting karena tantangan pembangunan di era modern semakin kompleks, meliputi persoalan kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan masa depan.

Pembangunan pada hakikatnya dapat dilaksanakan atas dasar perencanaan, karena perencanaan yang baik dapat menjadi awal dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan perencanaan yang baik, sasaran yang tepat akan mendorong terlaksananya perencanaan yang lebih optimal sehingga terciptalah pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi keputusan atau pilihan berbagai alternatif pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang (Joko Pramono, 2020).

Sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diterbitkan, nomenklatur yang digunakan dalam proses perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau disingkat BAPPERIDA merupakan lembaga teknis daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diketuai oleh Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedudukan BAPPERIDA merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. BAPPERIDA mempunyai tujuan utama yang harus dicapai salah satunya adalah meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, partisipatif, dan berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan Nasional.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun sebagai penjabaran dari tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah OKU Selatan berupa visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang visioner serta memuat hal-hal yang fundamental. Sehingga memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. OKU Selatan dalam melaksanakannya sebagai penyelenggara pemerintahan untuk memenuhi amanat sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut

berisi kegiatan pembangunan yang terus menerus tanpa henti, dengan cara meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Penyelenggaraan upaya tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah secara berkelanjutan, bertahap, dan berkesinambungan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. RPJPD digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu lima tahun, dan program tahunan yang lebih rinci (Andrias, 2024).

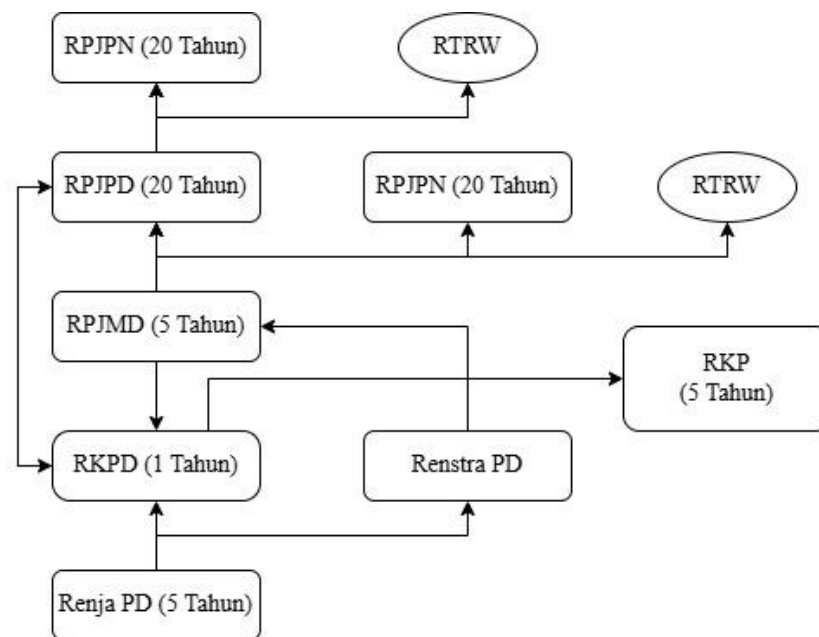
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) OKU Selatan Tahun 2005–2025 disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan meliputi :

- a. Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, salah satu evaluasi pelaksanaan yang dilakukan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 OKU Selatan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan periode 2005-2025. Terkait dengan kebijakan nasional dan kebijakan serta pembangunan provinsi merupakan aspek penting dalam evaluasi RPJPD 2005-2025. Hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 OKU Selatan tahun 2005-2025 akan sangat menentukan tindak lanjut perencanaan pembangunan OKU Selatan di masa yang akan datang.

Adapun hubungan keterkaitan penyusunan RPJPD dengan penyusun lainnya pada level daerah maupun level pusat dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut ini :

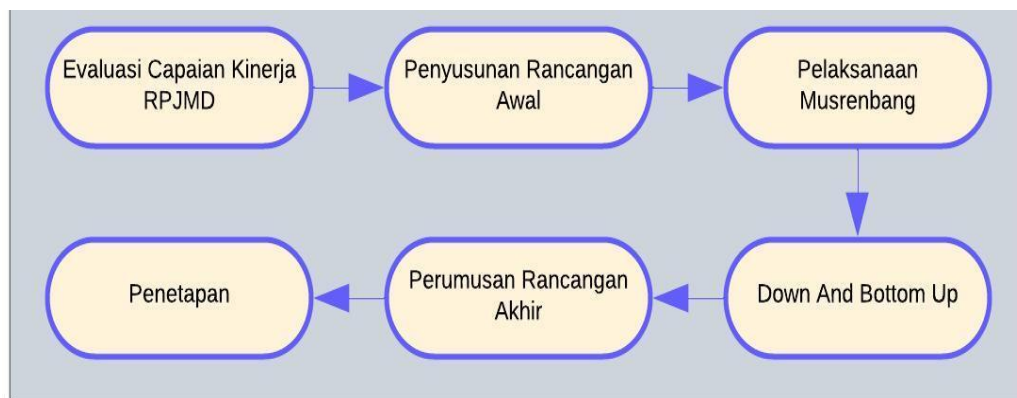
Gambar 1 Hubungan Keterkaitan RPJPD dengan Penyusunan Lainnya



Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang telah peneliti lakukan, dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang di OKU Selatan terdapat beberapa tahapan yang telah dilaksanakan di BAPPERIDA, mulai dari melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja RPJMD, menyusun rencana awal, menyusun rencana, melaksanakan Musrenbang, down dan bottom up (berupa usulan dari pemerintah pusat), merumuskan rencana akhir, menetapkan usulan tersebut kemudian dihimpun dalam bentuk rencana kerja OPD, kemudian tahap selanjutnya OPD membuat forum perencanaan kemudian menginput rencana dan program kerja apa saja yang telah diusulkan saat Musrenbang, setelah forum perencanaan dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah menyeleksi rencana apa saja yang menjadi sasaran utama pembangunan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan rencana akhir untuk diajukan kepada Kepala Daerah guna diolah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Jika dijabarkan di bawah ini alur perencanaan pembangunan daerah jangka panjang di BAPPERIDA OKU Selatan :

Gambar 2 Alur Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah di BAPPERIDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



Sumber : Bidang PPEPD BAPPERIDA Ogan Komering Ulu Selatan

Tahapan dan proses penyusunan RPJPD dinyatakan oleh staf fungsional dari bidang PPEPD di BAPPERIDA OKU Selatan, Ibu Olga Mardisadora. Beliau mengatakan :

“Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang OKU Selatan Tahun 2005-2025 juga dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial dengan menggunakan metode studi pustaka, informasi stakeholder perencanaan pembangunan dalam rapat umum maupun wawancara dengan tokoh masyarakat yang dipandang perlu dalam memetakan keinginan masyarakat baik dari bentuk maupun kondisi OKU Selatan itu sendiri”. (interview, Olga Mardisadora, 05/09/2024).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada saat pra riset, ditemukan adanya beberapa permasalahan atau kendala dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu kesulitan memproyeksikan jangka panjang dalam pengumpulan data terkait indikator kinerja untuk 20 tahun kedepan, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dinamis dapat membuat proyeksi 20 tahun ke depan menjadi tidak pasti. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, demografi, dan ekonomi global sering kali sulit diprediksi dengan tepat. Kemudian kurangnya data yang berkualitas di banyak daerah dikarenakan dokumen yang diperlukan hilang, belum tersedia atau tidak lengkap. Ketersediaan data yang akurat sangat penting untuk menghasilkan proyeksi yang realistis.

Kendala yang dihadapi berikutnya yaitu aturan yang tidak konsisten antara Permendagri 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas serta Menteri Dalam Negeri sehingga terjadinya tumpang tindih kebijakan dimana Permendagri 86 Tahun 2017 mengatur mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun terbitnya Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri menunjukkan pedoman tambahan yang kadang-kadang tidak selaras dan memunculkan kebingungan. Kendala yang dihadapi berikutnya yaitu belum ditetapkannya Undang-Undang RPJPN serta RPJP Provinsi Sumatera Selatan, yang dapat menjadi risiko ketidaksinkronan antara

kebijakan Daerah dengan kebijakan Nasional dan Provinsi. Hal tersebut menyebabkan penyusunan RPJPD semakin kompleks dan rentan terhadap ketidakselarasan kebijakan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu hal serupa turut terjadi di instansi lain seperti didalam penelitian yang dilakukan oleh Lola Fitria Sari, Maizul Rahmiza, Yulina Eliza dan Gerry Hamdani Putra dengan judul penelitian “Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat”. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa dalam penyusunan RPJPD terdapat permasalahan seperti ketidaklengkapan data laporan kinerja 20 tahun sebelumnya sehingga menjadi keluhan oleh para tim penyusun RPJPD. Hal tersebut terjadi karena adanya renovasi, atau tidak disiplinnya para pegawai dalam mengarsipkan dokumen (Lola Fitria Sari et al., 2023).

Solusi dari permasalahan yang dihasilkan dari wawancara diatas adalah dengan mengembangkan atau memperbarui sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data dari berbagai sektor, melakukan upaya pendekatan antara Permendagri 86 Tahun 2017 dan surat edaran bersama yang baru terbit. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas perlu berkoordinasi untuk menetapkan prioritas aturan, terutama terkait dokumen perencanaan jangka panjang. Kemudian Pemerintah daerah harus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai perkembangan penetapan RPJPN. Dengan demikian, meskipun dokumen belum resmi ditetapkan daerah tetap dapat menyelaraskan arah kebijakan yang akan dimasukkan dalam RPJPD, sehingga dalam penyusunan RPJPD dapat menggunakan acuan sementara seperti

menggunakan dokumen perencanaan sebelumnya atau dokumen transisi yang sudah tersedia yang menjadi panduan awal hingga RPJPD resmi ditetapkan.

Adanya permasalahan atau kendala dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tidak menjadi halangan bagi BAPPERIDA OKU Selatan untuk melakukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip bahwa indikator capaian kinerja harus mampu menghasilkan peningkatan nyata bagi pembangunan daerah. Berdasarkan uraian dan data di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat (2) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 OKU Selatan“.

1.2 Perumusan Masalah

Keterbatasan data dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menyebabkan sulitnya melakukan proyeksi pembangunan 20 tahun mendatang dalam kondisi yang dinamis. Terdapat ketidakkonsistenan antara Permendagri 86 Tahun 2017 dengan Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas yang memicu terjadinya kerancuan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pencapaian Indikator Kinerja pada RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama periode 2005-2025 berdasarkan Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat (2) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) OKU Selatan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana capaian indikator kinerja pada RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama periode 2005-2025 berdasarkan Implementasi Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat (2) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) OKU Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya dan diharapkan dapat menjadi acuan terkait implementasi kebijakan pembangunan daerah, serta capaian kinerja untuk mendukung pembangunan daerah jangka panjang.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi Badan Penelitian dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPERIDA) OKU Selatan dalam mengembangkan perencanaan pembangunan daerah, serta penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, & Widodo Supriyono. (2008). *Psikologi Belajar*. Rineka Cipta.
- Amrin, Mahmud, M. K., & Nurfurkon, A. (2023). Implementasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Di Kabupaten Sumedang. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 42–55. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i1.3357>
- Andrias, M. Y. (2024). Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten/Kota) Perspektif Peraturan Perundang. In *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 4, Issue 1).
- Basuki, P. (2022). *Jurnal Dialektika Politik Volume 6 Nomor 2 Implementasi Kebijakan Program Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kube Di Desa Citarik Palabuhanratu Sukabumi*. <https://doi.org/10.37949/jdp>
- Billy Pradana, Alexius Sunaryo, & Aris Toening W. (2021). Analisa Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 6(2), 110–114.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. PT. Buku Kita.
- Budi Winarno. (2008). *Kebijakan Publik*. PT. Buku Kita.
- Budi Winarno. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus* (Kedua). Center of Academic Publishing Service, CAPS.
- Christine Gitta Candra Puspita, & Margareta Suryaningsih. (2016). Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(1).
- Christine Tampongangoy, Johnny Hanny Posumah, & Very Londa. (2016). Village Head Of Performance Evaluation In Development Implementation Village (Studies In The Village Of Upper Subdistrict Ranoketang Touluan Southeast Minahasa Regency) . *Jurnal Administrasi Publik*, 3(41).
- Daniel A. Mazmanian, & Paul A. Sabatier. (1986). *Implementation and Public Policy* . Harper Collins.

- Daniel L. Stufflebeam, & Chris L.S. Coryn. (2007). *Evaluation Theory, Models, And Applications* (Second). Jossey-Bass.
- Delly Maulana, & Arif Nugroho. (2019). *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. CV. AA. Rizky.
- Dokumen. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*.
- Fikri, R., Nurpratiwi, R., & Saleh, C. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan* (Vol. 5, No. 2). www.jurnal.unitri.ac.id
- Gagah Daruhadi, & Pia Sopiati. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *Jurnal Cendekia Ilmia*, 3(05).
- Gerge C. Edwards III. (1980). *Implementing Public Policy*. Texas A & M University.
- Ginanjart Kartasasmita. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES.
- Ismawati, D., Suwarno, S., Pramono, T., Fachruddin, I., & Umanailo, M. C. B. (2023). Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5(1), 58–68. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1502>
- James Anderson. (1979). *Public Policy Making* (Second). Holt Rinehart and Winston, New York.
- John W. Creswell. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Belajar.
- Joko Pramono. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyono, Ed.). UNISRI Press.
- Joko Widodo. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media.
- Karnadi, & Ika Lestari. (2009). Evaluasi Jurnal Ilmiah. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 110–124.
- Kinkin Suartini. (2011). Pengaruh Metode Mind Mapping Terhadap Pemahaman Mahasiswa Membuat Kerangka Berpikir Pada Pelaksanaan Proposal Penelitian Dalam. *Proposal Penelitian*.

- Lexi J. Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Lola Fitria Sari, Maizul Rahmizal, Yulina Eliza, & Gerry Hamdani Putra. (2023). Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. *Jurnal Pengabdian KITA*, 6(1).
- M Jufri Aburaera, Hasran, & Bactiar. (2023). Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Makassar . *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 14(1).
- Matthew B. Milles, & A. Michael Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon, 3). SAGE Publications, Inc.
- Merilee S. Grindle. (2015). *Politics and Apolicy Implementation in The Third World* . Princetown University Press.
- Mohan Nair. (2002). *Sistem Informasi Berbasis Aktivitas : Pedoman Implementasi Bagi Eksekutif*. Salemba Empat.
- Moris Adidi Yogia, & Dia Meirina Suri. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *SOSIO KONSEPSIA*, 9(03).
- Muhammad Mukmin. (2017). *Perencanaan Pembangunan* . CV. Dua Bersaudara.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan* (7th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. (2023). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023. In *Journal of Geopolitics and Public Policy* (Vol. 1, Issue 2).
- Nidya Putri Syahida, & Suryaningsih. (2024). Integrasi Pilar Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen RPJPD Lombok Barat. *JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)*, 10(2).
- Noeng Muhadjir. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Reke Sarasin.
- Nurcholif, Hanif, Milwan, Tijan, & Hardi Warsono. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah* . PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat (2). *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)*.

- Piroza, R. (2024). *Perencanaan Kinerja Yang Berkualitas Sebagai Bagian Dari Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pada Tahap I RPJPD 2025-2045 Melalui Pelaksanaan RPJMD 2025-2029* (Vol. 2, Issue 1). <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology>
- Putra, A. R., Silfiana, S., & Afriani, R. I. I. (2023). Refleksi Hasil Pembangunan Daerah Provinsi Banten Periode 2005 - 2025. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 7(2), 182–195. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v7i2.259>
- Randall B. Ripley, & Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. The Dorsey Press.
- Riant D. Nugroho. (2012). *Public Policy*. Elex Media Komputindo .
- Samodra Wibawa. (1994). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Intermedia.
- Sirajuddin Saleh. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (Hamzah Upu, Ed.). Pustaka Ramadhan.
- Solichin Abdul Wahab. (2001). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Solichin Abdul Wahab. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Edisi Kedua). Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian. (1994). *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*. CV. Haji Mas Agung .
- Sriharyati, S., & Sholihannisa, L. U. (2020). Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan Menggunakan Analytic Hierarchy Procces (AHP). In *Jurnal Administrasi Bisnis* (Vol. 6, Issue 1).
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Terori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.

- Sutrisno Hadi. (2015). *Metodologi Riset*. Pustaka Pelajar.
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Utami, D. F., Kabupaten, B., Utara, K., & Peneliti, K. (2021). Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021. In *Journal of Public Administration and Sociology of Development* (Vol. 2, Issue 1).
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>
- William N. Dunn. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (kedua). Gadjah Mada University Press.
- Yohanes David Herwaka, & Sri Ati Suwanto. (2018). Evaluasi Kualitas Aplikasi E-Foto Dalam Pengelolaan Arsip Foto Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(2), 241–250.
- Zainuddin Iba, & Aditya Wardhana. (2023). *Metode Penelitian* (Mahir Pradana, Ed.). Eureka Media Aksara.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Patta Rapanna, Ed.). CV. syakir Media Press.